

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, perusahaan dituntut untuk meningkatkan daya saing dan membutuhkan dana yang besar agar semakin unggul dalam persaingan global. Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan mendorong manajemen untuk memilih keputusan pendanaan secara efisien yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Teori *Pecking Order* menjelaskan perusahaan terlebih dulu menggunakan pendanaan internal untuk membiayai operasional perusahaan. Menurut Myers (1984), pendanaan internal dapat diperoleh dari laba ditahan yang dihasilkan dari operasional perusahaan. Apabila pendanaan internal masih kurang, maka perlu pendanaan eksternal yang akan didapat dari hutang.

Menurut Abor (2007), struktur modal adalah gabungan antara hutang dan modal sendiri dalam membiayai operasional perusahaan. Pemilihan struktur modal mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri. Apabila perusahaan memilih hutang dengan proporsi lebih tinggi, mengakibatkan adanya resiko gagal bayar kepada kreditur (Janah, 2014). Kelebihannya yaitu dengan memilih hutang dalam proporsi tinggi maka perusahaan mendapat keuntungan dari pengurangan pajak karena adanya beban bunga (Modigliani dan Miller, 1963).

Manajemen harus memberikan perhatian besar dalam menentukan proporsi jumlah hutang dan ekuitas serta biaya modal yang sesuai sehingga terciptanya struktur modal optimal. Langkah-langkah yang harus diambil oleh manajemen dalam

menetapkan struktur modal optimal dengan cara meminimumkan biaya modal rata-rata dan memaksimalkan nilai perusahaan (Riyanto, 2001). Perusahaan memiliki pendanaan yang efisien jika mempunyai struktur modal optimal sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan.

Dalam menentukan keputusan pendanaan, manajemen tidak hanya mementingkan kepentingan dirinya, akan tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*. Menurut Crossman dan Hart (1982) dalam Kipkirong (2016) bahwa proporsi tingkat hutang yang lebih tinggi meningkatkan ancaman kebangkrutan yang membuat manajemen berada dibawah tekanan untuk menggunakan sedikit hutang agar melindungi kepentingan manajemen. Padahal menggunakan tingkat hutang lebih tinggi akan lebih meningkatkan pemantauan yang dilakukan oleh *stakeholders* dan membatasi tindakan yang dilakukan oleh manajemen agar tidak semena-mena.

Agar tindakan manajemen lebih terbatas maka diperlukan adanya penerapan *corporate governance* dalam mengawasi tindakan yang akan dilakukan oleh manajemen. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001), *corporate governance* didefinisikan sebagai “Seperangkat peraturan yang mengendalikan hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, serta pemangku kepentingan internal maupun eksternal lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban mereka”. Menurut Maharani (2012) penerapan *corporate governance* dapat dilakukan dengan mekanisme internal yaitu menunjuk beberapa *stakeholders* sebagai perwakilan dewan komisaris pada

perusahaan. Dengan adanya dewan komisaris, *stakeholders* dapat mengawasi tindakan manajemen secara langsung.

Beberapa penelitian mengenai hubungan antara *corporate governance* terhadap struktur modal telah banyak dilakukan seperti oleh Abor (2007), Kajanathan (2012), Bulan (2014), Kipkirong (2016), Thesarani (2017) dan Kusumo dan Hadiprajitno (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Thesarani (2017) menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan karena kurang efektifnya dewan komisaris melakukan pengawasan maka keputusan struktur modal lebih banyak ditentukan oleh dewan direksi. Sementara Abor (2007) memaparkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap struktur modal perusahaan karena kebijakan hutang yang tinggi meningkatkan nilai perusahaan melalui pengawasan yang ketat. Penelitian yang telah dilakukan oleh Kipkirong (2016) menguraikan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap struktur modal karena dapat lebih mengontrol manajemen jika memilih pendanaan hutang. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan Kusumo dan Hadiprajitno (2017) yang memaparkan proporsi komisaris independen signifikan negatif terhadap struktur modal. Komisaris independen dapat mengurangi kecurangan dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga berdampak pada profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian Kusumo dan Hadiprajitno (2017) menemukan bahwa berdasarkan teori *pecking order* perusahaan lebih memilih pendanaan secara internal dibandingkan dengan hutang. Penelitian yang dilakukan oleh Bulan (2014) menemukan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal karena peran komite audit hanya sekedar

membantu tugas komisaris sehingga terbatas dalam menentukan struktur modal perusahaan. Sementara menurut Kajanathan (2012) menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap struktur modal karena komite audit cenderung memilih dalam mengeluarkan saham baru daripada dengan hutang karena akan merugikan pemegang saham diakibatkan beban bunga bertambah sehingga mengurangi laba perusahaan dan dividen yang diterima oleh *stakeholders* berkurang. Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kekuasaan *CEO* dalam mempengaruhi struktur modal perusahaan yang telah dijabarkan oleh Abor (2007) menjelaskan bahwa masa jabatan *CEO* (*CEO tenure*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal karena lama masa jabatan *CEO* karena keputusan pendanaan dipilih oleh tim manajemen dan *CEO* hanya bertanggung jawab serta melaporkannya kepada dewan komisaris. Sementara menurut Berger et al (1997) dan Abor (2007) menguraikan bahwa masa jabatan *CEO* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal karena masa jabatan *CEO* memiliki hubungan negatif dengan struktur modal karena *CEO* lebih suka menggunakan hutang yang sedikit untuk mengurangi tekanan kerja.

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu, terlihat belum terdapat konsensus yang menunjukkan konsistensi hasil antar penelitian. Ketidakkonsistenan pada hasil penelitian disebabkan adanya perbedaan faktor yang terbukti pada satu penelitian, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap penelitian lainnya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan penelitian seperti perbedaan sampel, waktu, dan populasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih terbaru dan akurat terkait pengaruh *corporate governance* terhadap struktur modal di Indonesia.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018 dengan mengecualikan sektor keuangan karena adanya perbedaan struktur dan nama akun pada laporan keuangan. Penelitian ini akan meneliti beberapa karakteristik *corporate governance* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap keputusan struktur modal perusahaan. Karakteristik dalam organ *corporate governance* yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, masa jabatan *CEO*, serta mekanisme *corporate governance* yaitu ukuran komite audit yang dapat dilihat pada laporan tahunan. Struktur modal diukur dengan *Debt Ratio* (DR) yang datanya diperoleh dari laporan keuangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang harus diteliti yaitu:

1. Apakah ukuran dewan komisaris mempengaruhi struktur modal perusahaan?
2. Apakah proporsi komisaris independen mempengaruhi struktur modal perusahaan?
3. Apakah ukuran komite audit mempengaruhi struktur modal perusahaan?
4. Apakah kekuasaan *CEO* mempengaruhi struktur modal perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap struktur modal perusahaan.
2. Menguji secara empiris pengaruh proporsi komisaris independen terhadap struktur modal perusahaan.
3. Menguji secara empiris pengaruh ukuran komite audit terhadap struktur modal perusahaan.
4. Menguji secara empiris pengaruh kekuasaan *CEO* terhadap struktur modal perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan untuk berbagai pihak dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, diharapkan lebih memperhatikan penerapan *good corporate governance* pada perusahaan sehingga membantu pada pemilihan keputusan pendanaan yang tepat dan meningkatkan nilai perusahaan.
2. Bagi akademisi, dapat berguna sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya atas pengaruh *corporate governance* terhadap struktur modal.
3. Bagi *stakeholders*, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan *corporate governance* terhadap struktur modal sehingga membantu mendapatkan return yang optimal.

1.5. Sistematika Penulisan

Bentuk sistematika penulisan pada penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

BAB I

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Dalam bab ini memuat landasan teori, penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini, hipotesis dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian, pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian beserta variabel yang akan digunakan.

BAB IV

Bab ini berisikan proses penelitian dan hasil yang didapat dari penelitian ini.

BAB V

Pada bab ini menggambarkan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini beserta saran dari penulis.

